

**ANALISIS UPAYA *TRUST BUILDING* PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN DIBAWAH KEPEMIMPINAN BUPATI SRI MULYANI**

Muchlas Adi Nugroho

14010116130051

Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRACT

The emergence of the phenomenon of political dynasties and cases of bribery of promotion of job titles caused public trust to the Klaten Regency Government declined. The new Klaten Regent, Sri Mulyani has a big responsibility in improving governance while at the same time restoring public trust. Regent Sri Mulyani on the other hand turned out to have ambitions to run again as Klaten Regent in the 2020 elections. The ambition made the trust building efforts undertaken by the Klaten Regency Government prone to political interests.

The purpose of this study is to explain the trust building efforts undertaken by the Klaten Regency Government under Sri Mulyani Regent and to analyze the influence of Sri Mulyani Regent's political interests ahead of the 2020 elections in the implementation of trust building efforts. The method used in this study is a qualitative explorative method of primary data in this study obtained directly from interviews with resource persons, while secondary data is obtained indirectly through documents, mass media, social media, and internet. The theoretical basis used is the theory of trust, governance and bureaucratic reform.

Based on data from the results of field research, the Klaten Regency Government under the leadership of Sri Mulyani Regent has made various responsive efforts in the context of rebuilding public trust (trust building). However, the trust building effort still leaves important records that need to be underlined. Trust building efforts undertaken by the Klaten Regency Government tend to prioritize the political interests of the Regent of Sri Mulyani in the lead-up to the 2020 elections rather than the aspects of bureaucratic reform. The Klaten Regency Government needs to rebalance the implementation of trust building efforts by emphasizing more on aspects of bureaucratic reform and setting aside the incumbent's electoral political interests.

Keywords: Public Trust, Trust Building, Bureaucratic Reforms, Political Interest

PENDAHULUAN

Munculnya fenomena politik kekerabatan dan kasus suap promosi-mutasi jabatan mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Klaten menurun. Sri Mulyani atau Yani Sunarno, Bupati Klaten yang baru, memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sri Mulyani juga memiliki peran yang besar untuk mendorong upaya reformasi birokrasi secara lebih konsisten. Upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat (*trust building*) melalui reformasi birokrasi yang dilakukan Sri Mulyani bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten menarik untuk dikaji karena upaya-upaya yang dilakukan Sri Mulyani bersama jajarannya bisa menjadi cerminan tolak ukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Klaten memperbaiki diri pasca kasus korupsi suap promosi-mutasi jabatan birokrasi. Upaya *Trust Building* menjadi momentum bagi Sri Mulyani untuk menepis *stereotype* dan stigma negatif mengenai dirinya terkait isu politik dinasti/politik kekerabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menjadi semakin menarik untuk dikaji karena melalui penelitian ini akan dapat diketahui sejauh mana keseriusan dan konsistensi Sri Mulyani dalam mengupayakan reformasi birokrasi, utamanya dalam pengisian jabatan atau Manajemen SDM Aparatur, sektor yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.

Selain itu, Bupati Sri Mulyani disisi lain ternyata memiliki ambisi untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Klaten di Pilkada 2020. Adanya ambisi tersebut membuat upaya *trust building* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi rawan disisipi kepentingan politik.. Pengaruh kepentingan politik

Bupati Sri Mulyani dalam upaya *trust building* menarik untuk dikaji terlebih lebih ketika mendekati tahun politik Pilkada 2020. Pencitraan politik merupakan salah satu tendensi politik yang paling berpotensi muncul di tengah upaya *trust building* Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk itu penulis memulai penelitian ini dengan judul **Analisis Trust Building Pemerintah Kabupaten Klaten Dibawah Kepemimpinan Bupati Sri Mulyani.**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Bupati Klaten, Sekda Kabupaten Klaten, Kepala BKPPD Kab. Klaten, Plt. Kabag Pemerintahan, Kasubbag Akuntabilitas Kinerja dan RB Bagian Organisasi, Camat Jogonalan, PNS eselon IV, Anggota DPRD Kab. Klaten, Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Aktivis/Pegiat Sosial, dan Masyarakat.

KERANGKA TEORITIS

Kepercayaan (*Trust*)

Trust atau Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain yang kita yakin padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Lubis, 1994:81). Kepercayaan dalam istilah politik adalah apa yang disebut kepercayaan politik. Kepercayaan politik terjadi ketika warga menilai pemerintah

dan lembaga-lembaganya rasional, adil dan jujur. Kepercayaan politik, dengan kata lain, adalah penilaian warga negara bahwa sistem dan para penguasa politik responsif, dan akan melakukan apa yang benar bahkan tanpa adanya pengawasan terus-menerus (Miller dan Listhaug 1990, 358). Dengan demikian, kepercayaan politik adalah indikator sentral dari perasaan yang mendasari publik tentang pemerintahannya (Newton dan Norris, 2000:53).

Legitimasi merupakan salah satu aspek kepercayaan dalam tatakelola pemerintahan. Legitimasi sendiri merupakan perwujudan persetujuan warga negara untuk pemerintah yang berkuasa. Masyarakat menganggap Pemerintah *legitimate* ketika mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa kekuasaan yang diembannya benar-benar digunakan untuk mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang berkuasa memang pantas untuk memegang kekuasaan. Legitimasi terhadap pemerintah dapat dibangun dengan menghadirkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Menurut Mardiasmo (2009:18), terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan suatu usaha perubahan pokok suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku dan keberadaan atau kebiasaan birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan nasional. Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya yang sistematis, terpadu dan

komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi dilakukan dengan melakukan perubahan struktur, tingkah laku dan kebiasaan karena reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga pada tingkat struktur dan tingkah laku (Khan, 1981).

Pemerintah telah melaksanakan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki tahap kedua dan pelaksanaannya diatur dalam PERMENPAN Nomor 11 Tahun 15 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Beberapa permasalahan strategis yang masih perlu diperbaiki melalui reformasi birokrasi diantaranya; Birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dan akuntabel; Birokrasi yang belum sepenuhnya efektif dan efisien; dan Kualitas pelayanan publik belum sesuai yang diharapkan. Permasalahan strategis tersebut memerlukan upaya bertahap dan berkesinambungan dalam penyelesaiannya. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tahap kedua, telah ditetapkan 3 (tiga sasaran) utama yang ingin dicapai untuk menyelesaikan permasalahan strategis tersebut, yaitu dengan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Di dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi tahap kedua tersebut, pemerintah menyorot 8 (delapan) area yang perlu dilakukan perubahan dan pembenahan. Delapan area perubahan tersebut adalah perubahan mental aparatur; organisasi; tatalaksana; peraturan perundang-undangan; SDM aparatur; pengawasan; akuntabilitas; dan pelayanan publik.

***Trust Building* dalam Reformasi Birokrasi**

Trust Building dalam Reformasi Birokrasi, merupakan upaya membangun kepercayaan yang dilakukan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Membangun kembali kepercayaan masyarakat (*trust building*) terhadap pemerintah menjadi salah satu upaya krusial ketika kepercayaan masyarakat sedang mengalami penurunan. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah.

Upaya *trust building* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dibawah kepemimpinan Bupati Sri Mulyani memiliki beberapa aspek politis yaitu; (1) Untuk Membangun Legitimasi Pemerintah; (2) Untuk Memantapkan Posisi Bupati Sri Mulyani Menjelang Pilkada 2020, (3) Untuk Melanggengkan Praktik Politik Kekerabatan/Dinasti Politik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Trust Building Pemkab Klaten di bawah Kepemimpinan Bupati Sri Mulyani

1. Upaya Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Melalui Optimalisasi Media Sosial Kehumasan

Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dengan mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas. Dorongan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan diwujudkan dengan mendorong keterbukaan akses informasi kepada masyarakat melalui portal media digital (*website*) dan aplikasi layanan pengaduan Matur

Ibu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi kinerja dengan mengoptimalkan media sosial dalam mewartakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Bupati serta membuka akses kepada publik terkait laporan kinerja pemerintah daerah..

Setiap 3 (tiga) bulan sekali, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Bagian Humas Setda dan Dinas Kominfo juga mengadakan pertemuan rutin dengan pengelola akun media sosial baik dari internal Pemda ataupun dari pengelola akun-akun media sosial yang ada di masyarakat. Adanya forum pertemuan pengelola akun media sosial ini juga sekaligus dalam rangka menggandeng partisipasi dari masyarakat umum untuk bersama-sama membangun adanya mekanisme *check and balances* dalam pengelolaan pemerintahan. Disisi lain, dengan diadakannya forum pertemuan pengelola akun media sosial ini diharapkan juga terjalin kedekatan antara sesama pengelola akun media sosial, baik Pemda maupun masyarakat.

2. Upaya Mendekatkan Diri dengan Masyarakat melalui Kegiatan Dialog Tatap Muka bersama Masyarakat.

Selain melalui optimalisasi media kehumasan, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengadakan acara-acara yang bersifat tatap muka untuk membangun kedekatan dengan masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui acara kunjungan Sambang Warga dan forum dialog santai Ngopi Bareng Bupati. Ngopi Bareng Bupati mulai dilaksanakan pada 25 Januari 2019, ketika itu Bupati Klaten Sri Mulyani mengundang unsur Pemerintah Kecamatan, Desa

dan Kelurahan serta Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Kemalang dan Klaten Tengah untuk hadir di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Sementara Sambang Warga adalah kegiatan kunjungan yang dilakukan Bupati Klaten ke desa-desa untuk menjangkau aspirasi dan keluhan masyarakat yang ada di daerah ‘pelosok’. Partisipasi dari masyarakat perlu untuk dibangun melalui komunikasi langsung di lapangan sehingga Pemerintah benar-benar tahu apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan kunjungan Sambang Warga ini mulai dilaksanakan pertama kali pada 2 Mei 2018 di Kecamatan Bayat.

Di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten turut menghadirkan pelayanan publik terpadu di dalam Sambang Warga. Pelayanan Publik yang dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Sambang Warga diantaranya adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil, Pelayanan Kesehatan Matur Dokter dari Dinas Kesehatan dan RSUD Bagaswaras, Pelayanan Pajak Kendaraan Samsat Keliling dari Satlantas Polres Klaten, Pelayanan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dari BPKD, Pelayanan Perizinan dari DPMPTSP dan Pelayanan BPJS dari BPJS Kab. Klaten serta beberapa pelayanan lain. Hadirnya pelayanan publik dalam Sambang Warga ini mulai diinisiasi dalam kesempatan Sambang Warga di Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara pada 14 Januari 2020 dan di Desa Kadirejo Kecamatan Karangnom sehari berselang pada 15 Januari 2020.

Selama kurun waktu 2018-2020, Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan lebih dari 50 kali Sambang Warga di 26 Kecamatan yang ada

Kabupaten Klaten. Sementara untuk Ngopi Bareng Bupati, Pemerintah Kabupaten Klaten juga sudah belasan kali melaksanakannya dengan berbagai tema. Selain dua kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten juga sering menggelar kegiatan dialog tatap muka dengan Bupati melalui kegiatan Senam Bareng, Deklarasi, atau acara lain yang menghadirkan massa berskala besar.

3. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

Selain membangun kepercayaan masyarakat melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, Pemerintah Kabupaten Klaten juga melakukan pembangunan kepercayaan masyarakat melalui dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam hal pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas (ZI) sendiri merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat dan komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Sementara WBK/WBBM sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui reformasi birokrasi.

Dalam kaitanya dengan pencahangan program pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Klaten menggandeng kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yogyakarta. Acara pencahangan program Pembangunan Zona Integritas dilakukan Bupati Sri Mulyani di Taman Lampion Klaten pada tanggal 7 Agustus 2019. Dalam acara pencahangan ini turut hadir Pelaksana Tugas Inspektorat Kab. Klaten, Purwanto Anggono Cipto, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Yogyakarta, Slamet Tulus Wahyana, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida. Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijadikan percontohan program Pembangunan Zona Integritas ini, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras.

Sampai dengan saat ini, pelaksanaan Zona Integritas di Pemerintah Kabupaten Klaten sudah memasuki tahap penilaian internal. Inspektorat Kabupaten Klaten bersama OPD yang menjadi *role model* Zona Integritas masih terus melaksanakan koordinasi untuk menyusun indikator penilaian dan lembar kerja evaluasi untuk nantinya digunakan sebagai instrumen dalam penilaian internal. Inspektorat bersama OPD-OPD *role model* Zona Integritas juga tengah melakukan persiapan untuk tahap penilaian nasional. Penilaian dari Tim Penilai Nasional sendiri akan dilaksanakan bulan April-Mei 2020.

Dengan adanya pencahangan Zona Integritas ini, Bupati Klaten Sri Mulyani berharap ada perbaikan-perbaikan nyata dalam pelayanan publik

supaya di tahun 2020 Klaten dapat mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangannya bahkan kalau bisa juga meraih Adipura. Pencanaan tiga OPD sebagai percontohan Zona Integritas diharapkan menjadi *pilot project* yang diikuti OPD lainnya. Zona Integritas menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah sekaligus model dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Klaten. Sri Mulyani menambahkan bahwa pemberantasan korupsi itu perlu dimulai dari diri sendiri kemudian dikembangkan di lingkungan sendiri.

4. Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka dalam Proses Pengisian Jabatan

Adanya kasus suap promosi-mutasi jabatan yang terjadi sebelumnya merupakan evaluasi sekaligus *warning* bagi Pemerintah Klaten supaya tidak abai dengan regulasi Manajemen SDM yang ada. Di era kepemimpinan Bupati Sri Mulyani, Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya mendorong pelaksanaan manajemen SDM aparatur sebagaimana yang diamanahkan oleh regulasi yakni melalui mekanisme Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka di dalam proses pengisian jabatan.

Uji Kompetensi PNS merupakan tuntutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Uji Kompetensi PNS adalah mekanisme untuk menempatkan pegawai sesuai dengan bidang keahlian dan kecakapan yang dimiliki, *the man on the right place*. Tujuan diselenggarakannya Uji Kompetensi adalah *pertama*, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Kedua, memberikan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS. Sementara Seleksi Terbuka merupakan tuntutan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Seleksi Terbuka merupakan mekanisme pengisian jabatan untuk posisi eselon II. Tujuan dari mekanisme Seleksi Terbuka adalah untuk memperoleh aparatur yang handal dan profesional. Seleksi Terbuka memberi kesempatan pada siapapun yang merasa telah memiliki kompetensi dan pengalaman serta memenuhi persyaratan untuk berkompetisi secara terbuka dalam menempati suatu jabatan.

Di tahun 2017 sendiri Pemkab Klaten memulai pembenahan manajemen SDM aparatur dengan melakukan Uji Kompetensi sebagai dasar untuk melakukan promosi, mutasi dan rotasi jabatan. Uji Kompetensi di tahun 2017 dilaksanakan sebanyak dua kali dengan bekerja sama dengan LPMP Jawa Tengah dan LPPM UNS. Hasil dari Uji Kompetensi 2017 ini salah satunya menjadi dasar untuk pelaksanaan rotasi jabatan di tataran eselon II Pemkab Klaten. Contohnya adanya rotasi jabatan pada Desember 2017. Bupati Sri Mulyani yang kala itu baru saja ditetapkan sebagai bupati definitif melantik 11 pejabat eselon II yang mengalami rotasi dan mutasi jabatan. Salah satu yang dilantik adalah Surti Hartini, Kepala BKPPD yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker). Untuk Seleksi Terbuka sendiri, pasca OTT KPK Pemerintah Kabupaten Klaten mulai melaksanakan lagi pada tahun 2018. Berdasarkan data dari BKPPD Kabupaten Klaten, Seleksi Terbuka tahun 2018

mulai dilaksanakan pada 23 Juli 2018. Dalam Seleksi Terbuka ini terdapat 8 (delapan) posisi jabatan eselon II yang diperebutkan. Adapun posisi jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPKPP, Kepala DPMPTSP, Kepala DISOSP3AKB, Kepala Diskominfo, Kepala DLH, dan Kepala Disperwaskim.

Upaya pembenahan manajemen SDM aparatur birokrasi di Pemkab Klaten melalui penegakkan regulasi merupakan salah satu komitmen Bupati Sri Mulyani di dalam memperbaiki kondisi aparatur birokrasi di Pemkab Klaten. Bupati Sri Mulyani memiliki keinginan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwasanya Pemkab Klaten tidak seburuk yang dipersepsikan banyak orang karena kasus OTT KPK. Pemkab Klaten benar-benar serius dalam membenahi diri dan bahkan juga mampu untuk menorehkan prestasi. Pemkab Klaten sudah mulai menyadari bahwa manajemen

Catatan Penting Yang Perlu Digarisbawahi.

Secara garis besar, Pemerintah Kabupaten memang telah melakukan berbagai langkah kaitannya dengan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat (*trust building*). Namun, dalam pelaksanaan upaya *trust building* tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten masih memiliki beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi. Misalnya, upaya *trust building* Pemerintah Kabupaten Klaten cenderung lebih intens untuk melakukan upaya diluar aspek reformasi birokrasi seperti lebih seringnya melakukan kegiatan dialog tatap muka bersama masyarakat. Aspek reformasi birokrasi cenderung dikesampingkan sehingga membuat upaya

trust building menjadi tidak proporsional. Bila dikaji lebih mendalam upaya *trust building* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten cenderung mengarah kepada upaya untuk membangun kepercayaan/opini masyarakat terhadap Bupati Sri Mulyani. Seperti diketahui Bupati Sri Mulyani memiliki ambisi untuk mencalonkan diri kembali. Upaya *trust building* dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyisipkan kepentingan politik elektoralnya. Seperti misalnya, pemanfaatan media sosial kehumasan untuk membangun popularitas dan membentuk opini publik, kegiatan tatap muka dengan masyarakat melalui Sambang Warga dan Ngopi Bareng Bupati dimanfaatkan untuk kampanye terselubung dan membangun citra di tengah masyarakat. Selain itu, upaya reformasi birokrasi di dalam manajemen SDM aparatur birokrasi baru sebatas pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pelaksanaan Seleksi Terbuka. Belum ada mekanisme Talent Pool untuk menjaring dan mengelompokkan aparatur birokrasi sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Isu mengenai suap promosi-mutasi jabatan juga belum sepenuhnya hilang di era kepemimpinan Bupati Sri Mulyani. Dimungkinkan praktik suap promosi-mutasi jabatan tersebut masih berlangsung, namun memiliki pola dan mekanisme yang berbeda dengan sebelumnya.

PENUTUP

Simpulan

Pemerintah Kabupaten Klaten dibawah kepemimpinan Bupati Sri Mulyani telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat. Upaya responsif dalam rangka *trust building* tersebut dimanifestasikan dalam beberapa langkah kebijakan diantaranya; melakukan optimalisasi media

sosial kehumasan untuk membangun citra positif pemerintah daerah sekaligus membangun opini/kepercayaan masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka Sambang Warga dan Ngopi Bareng Bupati, mencanangkan pembangunan program Zona Integritas sebagai upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi, serta melakukan perbaikan dalam proses pengisian jabatan melalui implementasi regulasi Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka. Namun, upaya *trust building* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten masih meninggalkan beberapa catatan penting yang perlu untuk digarisbawahi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten cenderung condong ke upaya *trust building* terhadap Bupati Sri Mulyani menjelang Pilkada 2020. Proporsi reformasi birokrasi dalam upaya *trust building* cenderung tidak seimbang. Intensitas pelaksanaan kegiatan tatap muka dengan masyarakat cenderung lebih sering dilakukan dibanding upaya-upaya yang mengarah pada reformasi birokrasi.

Saran

Pemerintah Kabupaten Klaten perlu menyeimbangkan kembali pelaksanaan upaya *trust building* dengan lebih menekankan aspek reformasi birokrasi dan mengesampingkan kepentingan politik elektoral petahana. Pemerintah Kabupaten Klaten perlu lebih serius dan konsisten lagi di dalam mengupayakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi harus konsisten dilaksanakan untuk mencapai perbaikan-perbaikan di dalam pengelolaan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Blind, K. Peri. 2006. *Building Trust In Government In The twenty-First Century. Vienna : 7th Forum on reinventing Government Building Trust in Government*
- Citrin, J. 1974 *Comments : The Political Relevance of Trust in Government. American Political Science Review Volume 68 Issue 3*
- Dwiyanto, Agus. 2016. *Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintahan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.*
- Gea, Antonius Atosokhi. 2014. *Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis. Jurnal Humaniora Binus University Vol. 5 No. 2*
- Iqrom, Fahrizal. 2013. *Reformasi Birokrasi di Nusantara. Malang : Universitas Brawijaya Press*
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi*
- Nabella, Monica Amy. 2019. *Analisis Budaya dan Politik dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Program Matur Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2018. Skripsi. Universitas Diponegoro*
- Nugroho, Herlambang A. 2014. *Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah dalam Penentuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Jurnal Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Pamungkas, Catur P. 2018. *Politik Kekerabatan di Pilkada : Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini, S.E – Hj. Sri Mulyani pada Pilkada Kabupaten Klaten 2015. Skripsi. Universitas Diponegoro*
- Pramusinto, Agus dan Purwanto, Erwan Agus (Ed). 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Yogyakarta : Penerbit Gava Media*
- Pramusinto, Agus dan Kumorotomo, Wahyudi. *Governance Reform di Indonesia : mencari Arah Kelmbagaan politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.*
- Putnam, R. 1995. *Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. Political Science and Politics Vol. 28 Issue 4*
- Rofiq, Ainur. 2007. *Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Terhadap Partisipasi Pelanggan E-commerce (Studi Pelanggan E-commerce di Indonesia). Tesis. Universitas Brawijaya*
- Sahuri Chalid. 2009. *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pelayan Publik yang Berkualitas. Jurnal Ilmu Administrasi Negara vol. 9, hlm 52-59*
- Thoah, Miftah. 2004. *Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada*

Yat, H. (11). Konsep Kepemimpinan Dalam reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance. *Jurnal Administrasi Borneo*, 10 (1)
<https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v10i1.166>

Yuliana, Muammar. 2013. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wiladeg dalam Penguatan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Desa Wiladeg Karangmojo Gunung Kidul). *Jurnal Skripsi*. Universitas Gadjah Mada

Internet

www.klatenkab.go.id

Pemkab Klaten Segera Isi 9 Jabatan Eselon II, PNS Luar Daerah Boleh Ikut

<https://m.solopos.com/pemkab-klaten-segera-isi-9-jabatan-eselon-ii-pns-luar-daerah-boleh-ikut-879742/amp>

Tujuh Pejabat Eselon II Dilantik,
Mulyani Jamin Tidak Ada Suap
<https://klaten.sorot.co/berita-5373-tujuh-pejabat-eselon-ii-dilantik-mulyani-jamin-tidak-ada-suap.html>